

GLOBALISASI EKONOMI DAN PEMISKINAN MASYARAKAT: BAGAIMANA INSTITUSI AGAMA MERESPONNYA?

by Ola Rongan Wilhelmus

Submission date: 13-Aug-2019 01:18AM (UTC-0700)

Submission ID: 1159794190

File name: VOL._5.pdf (8.31M)

Word count: 9018

Character count: 78085



JPAK

Vol. 3, Tahun ke-3, April 2011

ISSN: 2085-0743

GLOBALISASI EKONOMI DAN PEMISKINAN MASYARACAT:
BAGAIMANA INSTITUSI AGAMA MERESPONNYA.
Ola Bangun Wilhelmus

KELUARGA KRISTIANI DAN RELASI
PERSAUDARAAN DALAM DINAMIKA TEKNOLOGI KOMUNIKASI.
Ed. Wilbur Singh

KELUARGA MEMADI SEMPAI DASAR
BAGI PANGGILAN IMAN DAN HIDUP MENGIKUTI.
Agustinus Supriyadi

KELUARGA DAN EKARISTI.
Don Basco Karman Andjanto

TUHAN, AJARLAH KAMI BERDOA:
MEREMUNGKAN KASIH TUHAN DI TENGAH KEDUKAAN
DAN KECEMASAN KELUARGA.
Tyentia Firmawanto

PERTAHANAN IMAN KELUARGA KATOLIK
YANG KECIL, LEMAH, MISKIN DAN
TERUNGKIR DALAM ARUS GLOBALISASI JAMAN INI.
Supriyo

NARORA DAN AKAR TANGGUNG JAWAB KELUARGA.
Agustin K. Kowul

KELUARGA DAN PENDIDIKAN IMAN ANAK DI ERA GLOBALISASI.
Antonius De

KELUARGA BERENCANA DAN PRAKTEK KE DALAM KELUARGA
KATOLIK.
Antonius Virdel Ericus Gaudowan

ASRANA DAN PONDOK PESANTREN
SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIKULTURAL.
B. Anton Triandyanoro

Jurnal Pendidikan Agama Katolik

Lembaga Penelitian
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Teologi Katolik
"Widya Yuwana"
MADIUN

JPAK

JURNAL PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) adalah media komunikasi ilmiah yang dimaksudkan untuk mewadahi hasil penelitian, hasil studi, atau kajian ilmiah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Katolik sebagai salah satu bentuk sumbangan STKIP Widya Yuwana Madiun bagi pengembangan Pendidikan Agama Katolik pada umumnya.

Penasihat

Ketua Yayasan Widya Yuwana Madiun

Pelindung

Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun

Penyelenggara

Lembaga Penelitian STKIP Widya Yuwana Madiun

Ketua Penyunting

Hipolitus Kristoforus Kewuel

Penyunting Pelaksana

FX. Hardi Aswinarno

DB. Karnan Ardiyanto

Penyunting Ahli

John Tondowidjojo

Ola Rongan Wilhelmus

Armada Riyanto

Sekretaris

Gabriel Sunyoto

Alamat Redaksi

STKIP Widya Yuwana

Jln. Mayjend Panjaitan, Tromolpos: 13. Telp. 0351-463208. Fax. 0351-483554

Madiun 63137 – Jawa Timur – Indonesia

Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, STKIP Widya Yuwana Madiun. Terbit 2 kali setahun (April dan Oktober).



DAFTAR ISI

iii Editorial

1 GLOBALISASI EKONOMI DAN PEMISKINAN MASYARAKAT: BAGAIMANA INSTITUSI AGAMA MERESPONNYA

Ola Rongan Wilhelmus

21 KELUARGA KRISTIANI DAN RELASI PER-SAUDARAAN DALAM DINAMIKA TEKNOLOGI KOMUNIKASI

JS. Wibowo Singgih

41 KELUARGA MENJADI SEMINARI DASAR BAGI PANGGILAN IMAM DAN HIDUP MEMBIARA

Agustinus Supriyadi

54 KELUARGA DAN EKARISTI

Don Bosco Karnan Ardiyanto

77 TUHAN, AJARLAH KAMI BERDOA: MERENUNGAN KASIH TUHAN DI TENGAH KEDUKAAN DAN KECEMASAN KELUARGA

Yuventius Fusi Nusantoro

87 PERTAHANAN IMAN KELUARGA KATOLIK YANG KECIL, LEMAH, MISKIN DAN TERSINGKIR DALAM ARUS GLOBALISASI JAMAN INI

Suparto

**113 NARKOBA DAN AKAR TANGGUNG JAWAB
KELUARGA**

Hipolitus K. Kewuel

**125 KELUARGA DAN PENDIDIKAN IMAN ANAK DI ERA
GLOBALISASI**

Antonius Tse

**151 KELUARGA BERENCANA DAN PRAKTEK KB
DALAM KELUARGA KATOLIK**

Antonius Virdei Eresto Gaudiawan

**189 "ASRAMA DAN PONDOK PESANTREN SEBAGAI
MODEL PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTI-
KULTURAL"**

R. Anton Trinendyantoro

GLOBALISASI EKONOMI DAN PEMISKINAN MASYARAKAT: BAGAIMANA INSTITUSI AGAMA MERESPONNYA?

Ola Rongan Wilhelmus
STKIP Widya Yuwana Madira

ABSTRACT

Globalisasi ekonomi dan pasar bebas merupakan di satu pihak sumber kekayaan bagi pemilik modal besar dan mereka yang memiliki akses kekuasaan, di pihak lain globalisasi menjadi sumber pemiskinan dan mala petaka bagi kebanyakan keluarga dan masyarakat kecil. Sadar akan kenyataan ini, para intelektual negara-negara berkembang sepakat bahwa globalisasi ekonomi merupakan mesin kapitalis yang memproduksi kemiskinan global karena telah merampas sebagian besar dari kekayaan dunia untuk segelintir orang. Peneglatan mutu kehidupan sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta upaya mencari solusi atas masalah kemiskinan akibat kebijakan ekonomi global dan pasar bebas ini merupakan bagian dari misi profetik dan tanggung jawab semua agama dan umat beriman. Agama Katolik sebagai suatu institusi sosial di tengah masyarakat dunia mempunyai tugas dan tanggungjawab profetik untuk membela dan membebaskan keluarga dan masyarakat yang terung-berung dari kemiskinan dan ketertindasan melalui bantuan karitatif maupun pemberdayaan sosial ekonomi, politik, kesehatan dan lain-lain.

KEY WORDS: *Globalisasi Ekonomi, Pasar Bebas, Kemiskinan, Misi Profetik Agama*

Pendahuluan

Globalisasi ekonomi dan pasar bebas sejauh ini telah digambarkan sebagai kekuatan magis yang mampu meningkatkan taraf hidup sosial-ekonomi masyarakat global. Ekonomi global diyakini sebagai kekuatan besar yang mampu mendorong negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk maju secara lebih cepat dalam bidang industri dan produksi. Perdagangan global mendorong manusia menggunakan faktor-faktor produksi dunia secara lebih efisien dan dengan demikian meningkatkan pendapatan, tabungan, pembelanjaan dan kesejahteraan hidup masyarakat dan keluarga kecil. Berdasarkan keyakinan ini maka globalisasi yang biasanya dikaitkan dengan menerima gaya hidup dan nilai kapitalisme sejati sebagai syarat kemajuan, kesejahteraan dan penurunan kemiskinan dipaksakan untuk diterima semua masyarakat dunia, terutama masyarakat dari negara-negara berkembang.

Bertentangan dengan persepsi tentang globalisasi ekonomi sebagai sebuah peluang magis untuk kemajuan dan kesejahteraan hidup masyarakat dan keluarga kecil, laporan dari *The International Forum on Globalization (2004)* menunjukkan bahwa **sepertiga orang terkaya dari penduduk dunia mengkonsumsi 55 % dari semua barang dan jasa. Sedangkan sepertiga dari masyarakat miskin hanya mendapatkan 1 % lebih sedikit. Sepertiga dari mereka yang terkaya ini juga menikmati 82 % perdagangan dan 68 % investasi asing langsung.** Seder akan kesenjangan persepsi optimistik tentang kebijakan ekonomi global dan pasar bebas serta realitas kehidupan yang sesungguhnya maka kebanyakan intelektual negara-negara berkembang sepakat bahwa globalisasi ekonomi dan pasar bebas dalam kenyataan tidak membawa banyak keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya menjadi sumber pemiskinan dan kemiskinan bagi keluarga dan masyarakat kecil.

Kesenjangan persepsi tentang berkah dari globalisasi ekonomi dan pasar bebas serta realitas sosial ekonomi yang dialami masyarakat ini melatarbelakangi tulisan ini. Tulisan ini dibuat dengan tujuan: pertama, melakukan diskusi singkat tentang globalisasi ekonomi dan pasar bebas serta reaksi pro dan kontra; kedua, menganalisis pengaruh globalisasi ekonomi terhadap persoalan ekonomi pada level makro maupun mikro; ketiga, menganalisis hubungan antara globalisasi ekonomi dan pemiskinan; dan keempat, mengadvokasi sikap institusi agama terhadap persoalan kemiskinan sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dan pasar bebas.

1. Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi dan pasar bebas diartikan sebagai **suatu proses menjadikan ideologi kapitalisme sebagai ideologi universal yang harus diadopsi semua bangsa secara sukarela ataupun terpaksa**. Suatu proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala Eropa dan Amerika Utara menjadi sistem ekonomi global atau sistem yang mendominasi dunia atas cara mengintegrasikan perekonomian nasional ke dalam istian perekonomian global. Proses globalisasi ekonomi ini dipopuler oleh negara-negara industri dan lembaga-lembaga internasional kapitalis seperti WTO, Bank Dunia dan IMF (Widyamartaya & Widyanta, 2004).

Pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi global dilakukan antara lain melalui proses privatisasi, pasar bebas, penghapusan berbagai hambatan terkait dengan perpindahan barang, modal dan jasa dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dan sebaliknya. Pengintegrasian ini mengakibatkan semua kegiatan ekonomi dan perdagangan dari berbagai bangsa dan negara terpadu menjadi suatu kekuatan ekonomi dan pasar global yang semakin terintegrasi dan bebas rintangan teritorial, budaya, ideologi dan sosial. Globalisasi ekonomi dan pasar bebas di satu pihak membuka peluang bagi pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara lebih kompetitif, tetapi di pihak lain membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik dan menguasainya (Harris & Dudy, 2002; Widyamartaya & Widyanta, 2004).

Globalisasi ekonomi juga terjadi dalam bentuk globalisasi produksi. Dalam globalisasi industri ini, suatu perusahaan internasional bisa memproduksi pada berbagai negara dan terus berjuang supaya biaya produksi menjadi lebih rendah dengan memarunkan upah buruh dan tarif bea masuk, membangun infrastruktur memadai, menciptakan iklim usaha dan politik yang lebih kondusif. Kehadiran tenaga kerja asing merupakan bagian dari globalisasi industri. Perusahaan-perusahaan global dapat memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia baik tenaga kerja profesional yang memiliki keahlian khusus dan berpengalaman internasional, maupun tenaga kerja buruh kasar dan murah dari negara berkembang. Melalui globalisasi industri, perusahaan-perusahaan global mendapatkan akses untuk memperoleh pinjaman dan melakukan investasi pada berbagai negara di dunia (Harris & Dudy, 2002).

Bertentangan dengan pandangan optimistik tentang globalisasi ekonomi dan pasar bebas itu, masyarakat pada negara-negara berkembang pada umumnya berpendapat bahwa substansi dari ekonomi global dan pasar bebas tidak lain dari pada imperialisme baru. Globalisasi ekonomi merupakan sistem baru ekonomi dunia para kapitalis yaitu: TNCs (transnational corporations), Bank Dunia, IMF, IFls (international financial institutions), G-8, TC (Trilateral Commission), dan WEF (the World Economic Forum). Bagi mereka, globalisasi ekonomi dan pasar bebas sejauh ini telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan multinasional dan bermodal besar memonopoli berbagai sektor baru bahkan pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Amin **Kris dalam bukunya: Soekarta Adhuma (2001)** mengemukakan bahwa globalisasi ekonomi dan pasar bebas merupakan neo-imperialisme. **Jeffrey Sachs**, seorang profesor ekonomi dari Universitas Columbia Amerika Serikat menilai ekonomi global dan pasar bebas tidak lain dari pada **lingkasan baru dari developmentalisme yang merupakan episode lanjutan dari imperialisme ekonomi yang gagal** memajukan kesejahteraan masyarakat dunia.

2. Reaksi Terhadap Globalisasi Ekonomi

Para pendukung globalisasi ekonomi dan pasar bebas berikap sangat proaktif terhadap globalisasi ekonomi. Bagi mereka, keterkaitan dan ketergantungan ekonomi antar bangsa manusia di seluruh dunia melalui perdagangan bebas, investasi dan bentuk-bentuk interaksi ekonomi dan komersial lainnya mengakibatkan produksi barang tertentu bisa dibuat dan dinikmati bersama oleh banyak orang dari berbagai negara dan masyarakat. Hilir mudiknya kapal-kapal dagang yang mengangkut dan menjual-beli barang dan jasa tertentu memajukan adanya keterkaitan dan ketergantungan ekonomi antar manusia. Transformasi ekonomi global telah membawa hampir semua bangsa dan lapisan masyarakat kepada globalisme ekonomi, dan sekaligus memunculkan kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia memiliki satu sistem ekonomi (Yusanto, 2008; Prasetyantoko, 2001).

Ketergantungan antar manusia dalam kehidupan sosial ekonomi telah difasilitasi oleh kemajuan teknologi komunikasi global seperti telepon genggam, televisi satelit dan internet yang membuat proses globalisasi ekonomi menjadi semakin cepat. Kemajuan teknologi global ini mengakibatkan percepatan serta dipersempitnya manusia untuk kegiatan

ekonomi dan bisnis semakin mudah. Jaringan komunikasi global membantu memperluas pasar untuk barang yang sama ke berbagai belahan dunia. Sebagai contoh: KFC, celana jeans levi's, McDonal dan hamburger melanda pasar dimana-mana. Ember, piring, gelas, sendok dan lain-lain yang diproduksi di Jawa semakin mudah menjangkau setiap hari keluarga-keluarga di berbagai pelosok Indonesia. Akibatnya masyarakat dunia baik yang berdomisili di kota maupun di desa memiliki selera global yang sama dan dapat mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang sama pula. Saat ini terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam bidang investasi dan perdagangan internasional. Akibatnya, perekonomian nasional menjadi bagian dari perekonomian global yang difasilitasi oleh kekuatan pasar global (Yusanto, 2008; Prasetyatoko, 2001).

Perdagangan bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai belahan bumi bisa mengimpor dengan lebih banyak barang-barang dari luar negeri. Dengan demikian, konsumen mempunyai pilihan lebih banyak atau berbagai macam produk sehingga dapat menikmati lebih banyak barang yang bermutu dengan harga terjangkau. Meluasnya perdagangan bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas. Selanjutnya modal untuk pembangunan sektor industri dan sektor lainnya dalam negeri yang dilakukan perusahaan-perusahaan domestik dapat diperoleh dari investasi asing. Perusahaan-perusahaan domestik ini sering memerlukan modal dari bank atau saham luar negeri yang memantapkan pasar uang dan pasar modal dalam negeri. Sadar akan kenyataan ini, Robert Gilpin dan Jean Millis Gilpin sebagaimana dikutip oleh Haris dan Dudy (2002) mengatakan bahwa globalisasi yang diemangati oleh neoliberalisme merupakan pencipta kesejahteraan paling berhasil yang pernah dikenal dunia. Namun pertanyaannya ialah apakah hasil produksi dan sumber kemakmuran global itu sudah didistribusikan secara adil?

Ekonomi global diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dunia sebab masyarakat dunia saling bergantung dan bisa mendatangkan keuntungan bagi satu sama lain. Salah satu bentuk kebergantungan paling signifikan ialah negara-negara dapat melakukan transaksi bisnis dan pertukaran nilai dagang sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Sebagai contoh, negara Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam hal produk kamera digital sementara itu Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam hal produk lainnya. Dengan demikian, Jepang dianjurkan menghentikan produksi lainnya yang

dibuat di Indonesia dan mengalihkan faktor-faktor produksi untuk memaksimalkan produksi kamera digital (Yusanto, 2008; Republika, 2006).

Salah satu penghambat utama ekonomi global dan kerjasama ekonomi antara negara terletak pada larangan dan kebijakan proteksi dari pemerintah atau negara pengimpor. Kebijakan seperti ini dinilai dapat meningkatkan biaya produksi barang impor sehingga sulit menembus pasar dunia. Sadar akan hambatan ini, pendukung ekonomi global menolak berbagai tarif, proteksi dan larangan akan barang-barang impor. Sebaliknya menghendaki agar diberlakukan kebijakan perdagangan bebas sehingga harga barang impor dapat ditekan, permintaan masyarakat akan barang impor meningkat, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat dan fair. Meningkatnya barang impor ini dapat mensjahterakan masyarakat. Bertitik tolak dari keyakinan ini, para pendukung ekonomi global terus berupaya memantirkan sekaligus menyeragamkan tarif serta menghapus berbagai hambatan non-tarif barang impor (Yusanto, 2008; Republika, 2006).

Berbeda dengan pandangan para pendukung ekonomi global, kelompok antiglobalisasi ekonomi menentang perjanjian perdagangan global dan lembaga-lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), World Bank dan IMF yang mendukung gerakan pasar bebas. Gerakan antiglobalisasi ini terdiri dari masyarakat dan negara yang merasa dirugikan oleh ekonomi global karena dianggap mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan nasional dan dunia ketiga. Hasil analisis para pesertang ekonomi global menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi dan pasar bebas telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan multinasional memonopoli berbagai sektor bisnis bahkan pangan sekalipun yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini tentu saja menjadi sumber kemiskinan, kelaparan, depresi dan kriminalitas. Metro TV sering memberitakan bagaimana keluarga-keluarga miskin mati kelaparan, para ibu menambuh diri dan anaknya sendiri karena kesulitan ekonomi rumah tangga. Kebijakan globalisasi ekonomi sebagaimana dijalankan Bank Dunia, IMF dan WTO sesungguhnya jauh lebih banyak menciptakan kemiskinan ketimbang memberi jalan keluar dan kemakmuran untuk keluarga dan masyarakat kecil (Winarno, 2004; Prasetyantoko, 2001).

Globalisasi ekonomi juga telah memperburuk neraca pembayaran barang-barang impor karena harga barang-barang impor cenderung

meningkat. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Investasi asing yang terus bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan investasi ke luar negeri terus meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran dan dengan demikian sektor keuangan semakin tidak stabil. Investasi asing yang terus bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan investasi ke luar negeri semakin besar. Menurunnya nilai ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran dan dengan demikian sektor keuangan semakin tidak stabil. Dampak buruk dari globalisasi dalam bidang ekonomi ini pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil, lapangan kerja bertambah kurang dan masalah pengangguran semakin sulit teratasi (Haris & Dudy, 2002).

Globalisasi merupakan sumber kemiskinan. Krisis ekonomi global di Asia dan Amerika Latin telah mengancam perekonomian dan stabilitas negara-negara berkembang. Krisis tahun 1997 dan 1998 bahkan merupakan sebuah ancaman bagi seluruh perekonomian dunia. Stiglitz (2002) sebagaimana yang dikutip oleh Yusanto (2008) mengatakan ekonomi global dan pasar bebas telah menghasilkan kemiskinan yang luar biasa. Di dalam bukunya: *In the Shadow of Globalization, Stiglitz secara terang-terangan mengatakan bahwa pemenang (the winner) dari globalisasi ekonomi dan pasar bebas adalah negara-negara industri/majalah dan international corporations. Sementara itu, sebagian besar negara berkembang menjadi pecundang* atau the loser dari politik globalisasi ekonomi dan pasar bebas.

3. Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Ekonomi Makro dan Mikro

Dalam era ekonomi global ini, perusahaan-perusahaan multinasional memonopoli seluruh perekonomian dunia. Sebagai contoh, saat ini terdapat 5 buah perusahaan besar milik Amerika Serikat yang selalu meraup keuntungan besar sampai US\$ 123 milyar (Rp 1.131,6 triliun) per tahun (US\$-Rp 9.200). Exxon Mobil misalnya mengantongi keuntungan US\$ 40 milyar setiap tahun, pada hal investasinya hanya sekitar US\$ 100 juta. Melalui monopoli kartel minyak yang menguasai hampir semua sumber minyak di dunia, termasuk Indonesia, kartel minyak dapat menaikkan harga minyak dunia dari US\$ 24/barrel menjadi lebih dari US\$ 110/barrel. Pada

hal biaya pengolahan minyak tidak lebih dari US\$ 15/barrel (Yusanto, 2008).

Robert H. Strain sebagaimana dikutip Yusanto (2008) mengatakan, **di sini kita hidup dalam sebuah dunia dimana 26 % penduduknya menguasai lebih dari 78 % produksi, 81 % energi, 70 % pupuk, dan 87 % perumahan dunia. Sebaliknya 74 % penduduk dunia pada negara-negara berkembang (Afrika, Asia, dan Amerika Latin) hanya mendapat seperlima produksi dari kekayaan dunia.** Perusahaan-perusahaan multinasional atau bermodal besar memonopoli berbagai sektor bisnis hingga bidang pangan. Duncan McLaren dan Wilmore seperti dikutip Nirami (2008) mencatat bahwa **pada tahun 2003 terdapat lima ratus perusahaan multinasional mengontrol hampir dua per tiga perdagangan dunia. Bahkan lima perusahaan multinasional terbesar dunia secara bersama-sama menghasilkan nilai penjualan tahunan lebih besar dibanding pendapatan 46 negara termiskin di dunia.** Berdasarkan kenyataan ini, para pemangku globalisasi mengatakan bahwa globalisasi yang dianggap-agungkan sebagai rasi kesejahteraan dunia pada akhirnya mulai menampakkan keborokannya sebagai sumber kemiskinan.

Castel sebagaimana dikutip Rais (2008) mengatakan bahwa bertentangan dengan kemegahan besar yang diraup perusahaan multinasional dan **para kapitalis, negara-negara miskin malah bertambah miskin. Pada saat ini kurang lebih 33 % penduduk dari negara-negara berkembang hidup dalam kemiskinan. Dari jumlah itu, 550 juta jiwa berada di Asia Selatan, 215 juta di Sub-Sahara Afrika, dan 150 juta di Amerika Latin.** Rais (2008) mengatakan, kesenjangan antara kaya dan miskin ini juga dapat dilihat dari **data-data berikutnya. Demi memperbaiki pendidikan dasar pada negara-negara berkembang, dibutuhkan dana 6 miliar USD setahun. Jumlah uang ini lebih sedikit dibanding dana 8 miliar USD setahun untuk belanja kosmetik di AS saja. Demikian pula dana yang diperlukan untuk instalasi air dan sanitasi seluruh negara berkembang kurang lebih 9 miliar USD setahun. Jumlah dana ini lebih kecil dari dana konvensional untuk krisis di Eropa yang besarnya 11 miliar USD setahun. Negara-negara berkembang membutuhkan dana sebesar 13 miliar USD untuk pemeliharaan kesehatan dan nutrisi setahun. Dana ini lebih kecil dibandingkan dengan dana untuk pakan hewan peliharaan (anjing dan kucing) di Eropa dan AS yang berjumlah 17 miliar USD setahun.**

Globalisasi ekonomi dan pasar bebas dalam praktik berarti keluarga, masyarakat dan negara-negara miskin dan berkembang harus membiayai efisiensi dunia demi kesejahteraan masyarakat dan negara industri atau kaya. Selain membiayai efisiensi global demi keuntungan dan kemajuan Utara. Kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin ini telah melahirkan semakin banyak keluarga dan orang miskin di dunia ketiga. Pada tahun 1990, terdapat 2.718 miliar penduduk hidup dengan uang kurang dari \$ 2 per hari/orang. Jumlah ini meningkat menjadi 2.801 pada tahun 1998. Ironisnya, hal ini terjadi ketika terjadi peningkatan total pendapatan dunia secara aktual sebesar rata-rata 2,5% setiap tahun (Nizami, 2006; Prasetyantoko, 2001).

Domikasi atau penguasaan atas tataran kehidupan sosial ekonomi oleh para pemilik modal besar melalui kebijakan ekonomi global dan pasar bebas juga sangat dirasakan di Indonesia. Hal ini terlihat dari melonjaknya harga minyak, beras dan harga kebutuhan pokok sehari-hari dari waktu ke waktu. Pada zaman Soeharto, pengusaha industri dilarang masuk ke sektor pertanian dan perkebunan sebab hal itu akan mematikan mata pencaharian petani. Soeharto selalu berusaha agar pangan tidak dikontrol sekecilntir pengusaha. Namun saat ini, para pengusaha termasuk pengusaha luar negeri bebas masuk ke sektor pertanian dan perkebunan serta menguasainya. Mereka cenderung memikirkan keuntungan sendiri dan bukannya kepentingan rakyat. Ketika harga pangan internasional naik, mereka juga dengan cepat menaikkan harga pangan. Karena tidak heran kalau harga minyak goreng merokot dari Rp 6.000/kg hingga menjadi Rp 14.000/kg hanya dalam hitungan bulan. Kalau rakyat tidak mau beli dengan harga tinggi maka para pengusaha tinggal menjelapor keluar negeri. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan pangan (Nizami, 2006; Prasetyantoko, 2001).

Era globalisasi ekonomi dan pasar bebas juga memperkuat pasar uang, modal dan pasar komoditi. Saat ini uang hanya menjadi bahan spekulasi untuk mendapat untung oleh para spekulan valas (valuta asing). Banyak negara seperti Inggris, Thailand, Singapura, Malaysia, Korea dan Indonesia hancur perekonomiannya karena mata uangnya jatuh akibat permainan spekulan valas. Pasar uang telah mengakibatkan modal yang seharusnya bisa dipergunakan untuk mendirikan banyak perusahaan terus berputar-putar di kalangan spekulan saham untuk mendapat untung. Tercatat sekitar Rp 1.000 triliun transaksi saham terjadi di Bursa Saham

Indonesia setiap hari, namun lebih dari 90 % hanya dipakai untuk spekulasi antara pemain saham. Uang mengalir ke sektor riil atau ekonomi untuk usaha ekonomi produktif sejauh ada insentif atau benefit. Permasalahan ini membuat perusahaan menjadi bangkrut seperti perusahaan Enron di AS (Nizami, 2008; Prasetyantoko, 2001).

Sampai dengan saat ini, terdapat begitu banyak pertambangan dalam negeri seperti minyak, gas, nias, perak, tembaga dan lain-lain di kelola perusahaan asing. Perusahaan ini telah mengeruk keuntungan besar dan hanya menyisakan sedikit receh untuk kolaborator yang bekerja untuk kepentingan mereka. Pada hal pertambangan itu seharusnya dikelola bersama rakyat Indonesia melalui BUMN supaya hasilnya bisa dinikmati juga oleh rakyat. Privatisasi yang menjadi salah satu kunci globalisasi ekonomi dan pasar bebas memaksa pemerintah menyerahkan BUMN-BUMN yang merupakan sumber dan kekuatan ekonomi rakyat kepada pihak swasta. Celakanya swasta tidak mau menerima BUMN yang rugi dan sebaliknya hanya mau menerima yang menguntungkan dan menghasilkan banyak uang. Akhirnya puluhan trilyun rupiah hasil keuntungan BUMN yang sebenarnya harus masuk ke Anggaran Belanja Negara (APBN) malah sekurangnya lari ke kantong segelintir pemilik uang. Sektor perkebunan kelapa sawit 100 % dikuasai swasta. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak punya kekuatan untuk mengontrol harga minyak goreng yang susah terjangkau oleh masyarakat sebab selalu mengikuti harga internasional. Seharusnya pemerintah paling sedikit menguasai lebih dari 50 % perkebunan ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga yang terjangkau. Swasta hanya memikirkan keuntungan bisnis dan karena itu tidak bisa diharapkan berjiwa sosial atau memenuhi kebutuhan rakyat (Nizami, 2008; Prasetyantoko, 2001).

4. Globalisasi dan Kemiskinan

Kebergantungan kepada negara-negara maju atau industri yang menguasai perusahaan multinasional semakin besar menyebabkan harga berbagai produk didominasi dan nilai uang dikendalikan oleh industri besar dan pemilik modal. Masyarakat kecil seperti petani dan nelayan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menentukan harga dari produk sendiri. Pada titik ini, globalisasi ekonomi dan pasar bebas merupakan sumber kekayaan bagi pemilik modal dan industri besar, dan sebaliknya menjadi sumber perusakan dan penderitaan bagi keluarga dan masyarakat kecil.

Kemiskinan pada dasarnya diartikan sebagai tidak tersedianya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, pakaian dan rumah yang layak huni bagi seseorang atau sebuah keluarga. Seorang dikatan miskin kalau mengalami kekurangan gizi, tidak mampu membeli obat ketika sakit, pendapatan kurang, pendidikan rendah serta kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pemerintah mengklaim bahwa penduduk miskin mencapai 31,6 juta orang atau 13,3 % dari jumlah penduduk Indonesia. Kemiskinan terdiri dari beberapa bentuk yaitu kemiskinan absolut, relatif, kronis, dan struktural. Kemiskinan absolut yakni kondisi kehidupan dimana pendapatan seseorang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan sementara atau relatif yakni kondisi hidup dimana kebutuhan pokok seseorang tidak terpenuhi karena bencana alam, kekeringan dan lain-lain. Kajian tentang kemiskinan memperlihatkan sejumlah dimensi kemiskinan yaitu kemiskinan ekonomi/material serta kemiskinan sosial budaya. Dimensi kemiskinan material atau ekonomi nampak dari ketidakanggapan seseorang atau sebuah keluarga memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dalam hidup sehari-hari seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan lain-lain karena harga barang kebutuhan pokok terus meningkat, sementara itu pendapatan keluarga dan masyarakat tidak meningkat. Budaya kemiskinan dapat terlihat dari terlembaganya sikap hidup apatis, apolitis, fanatik dan ketidakberdayaan (Bolong, 2007; Deivy A. Asia, 2005; Harian Kompas, 28 Januari 2011).

Kemiskinan disebabkan oleh melonjaknya harga minyak dan harga kebutuhan pokok sehari-hari dari waktu ke waktu, terutama harga beras. Hal ini disebabkan harga kebutuhan pokok ini dikendalikan oleh sektor swasta yang cenderung memikirkan keuntungan sendiri. Sementara itu, Badan Senior Ekonomi Baik Dunia Vivi Alatas (Harian Kompas, 28 Januari 2011) dan (Khadari, 2011) mengingatkan bahwa inflasi telah meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir pada tahun 2011 ini. Inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh melonjaknya harga pangan terutama beras. Ia mengingatkan, sulit diharapkan bahwa harga beras akan turun dalam beberapa bulan ke-depan karena trend harga internasional komoditas beras naik. Harga beras pada bulan Desember 2010 naik 30 % dibandingkan dengan Desember 2009. Diperkirakan harga beras akan naik dua kali lipat tahun ini. Oleh karena itu pemerintah Indonesia dingatkan untuk memperketat ekspor beras.

Kemiskinan juga diakibatkan karena sumber-sumber kehidupan masyarakat seperti minyak, gas, emas, perak, tembaga dan lain-lain dikuasai dan dikelola perusahaan asing. Sementara itu lahan untuk produksi bagi masyarakat kecil telah diambil alih oleh pemodal besar untuk perkebunan dan mall-mall besar. Saat ini terdapat 69,4 juta hektar tanah di Indonesia dikuasai oleh 682 perusahaan. Akibatnya banyak petani gurem yang memiliki tanah kurang dari 0,4 hektar atau tidak memiliki tanah sama sekali hingga terpaksa menjadi buruh tani dengan penghasilan kurang dari Rp. 100 ribu per bulan. Diusainya aset-aset ekonomi oleh segelintir pemodal modal besar ini menyebabkan masyarakat kecil telah mengalami kekurangan makanan, pengangguran, serta memburuknya kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat kecil (Bolong, 2007; Detzzy A. Aini, 2005).

Faktor lain dari kemiskinan ialah ketidakmerataan distribusi sumber kekayaan material, alam, modal dan teknologi. Contoh konkret yang bisa diungkapkan disini adalah kasus Irian Jaya. Pulau ini memiliki kekayaan minyak dan emas luar biasa banyaknya. Namun kekayaan ini telah dieksploitasasi dan dibawa ke luar secara besar-besaran oleh mereka yang memiliki modal besar dan memiliki akses kepada kekuasaan. Sementara itu, masyarakat lokal tetap hidup miskin. Demikian pula Riau dan Kalimantan Timur yang sangat kaya dengan sumber daya alam tetapi masih terdapat begitu banyak masyarakat yang buta aksara jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Jadi semakin kaya suatu daerah, tidak secara otomatis membawa berkah kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Bolong, 2007; Detzzy A. Aini, 2005).

Dampak kemiskinan tidak hanya ditanggung hari ini melainkan akan terus terbawa jauh ke masa depan bila tidak ada upaya serius memusnahkan rantai kemiskinan. Dampak kemiskinan ini secara khusus ditanggung oleh sekelompok masyarakat yang paling lemah terutama anak-anak, ibu keluarga dan para pemangku utamanya. Di Indonesia, pada tahun 2005, jumlah bayi yang lahir dengan kondisi berat badan rendah karena kurang gizi mencapai 350.000. Sedangkan bayi yang berada di bawah lima tahun menderita kurang gizi sebanyak 1,67 juta. Jumlah balita kurang gizi ini merambat menjadi 2,3 juta pada tahun 2006; dan pada tahun yang sama jumlah kematian ibu saat melahirkan menjadi 307 per 100.000 kelahiran. Ini berarti dalam setiap satu juta terdapat dua ibu meninggal ketika sedang bernafas. Hasil riset kesehatan dasar 2010 mengungkapkan bahwa jumlah penderita gizi kurang/buruk di kalangan anak Balita mencapai 17 %.

Masalah kekurangan gizi disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari kesulitan ekonomi, persoalan sosial budaya, kurangnya pengetahuan gizi, kesulitan akses pangan. Tetapi faktor utama yang mendasar adalah kemiskinan. Masalah kurang gizi di Indonesia kurang bisa diatasi karena program pengentasan keluarga dan masyarakat miskin juga belum menunjukkan hasil yang signifikan (Ali, 2011; Deivy A. Asis, 2005).

Sampai dengan saat ini, kemiskinan, penindasan, kebodohan, ketidakadilan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih saja terus terjadi terutama terhadap masyarakat dan keluarga kecil atau miskin. Demikian pula, korupsi, kolusi dan nepotisme masih terus dilakukan secara perseorangan maupun kolektif. Semuanya ini tidak terlepas dari praktek kolusi korporasi ekonomi global serta kebodohan politik nasional. Sekitar pertengahan April 2011, badan kompas menerbitkan sejumlah berita tentang betapa Indonesia dirugikan terkait perlakuan Perjanjian Pasar Bebas Asian-Cina (PDBAC). Himabanto (2011) menilai bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas korup digurakan negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional sebagai instrumen politik untuk kepentingan nasional mereka, dan untuk mengintervensi kedaulatan hukum serta negara lain setelah era kolonialisme berakhir. Perjanjian di bidang perdagangan sangat menguntungkan negara yang memiliki kebijakan mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi ke negara lain. Namun tidak sebaliknya bagi negara yang pelaku usahanya masih berkonsentrasi dalam negeri. Situasi seperti ini membuat seratusan juta warga masyarakat Indonesia terus hidup dalam kemiskinan.

5. Respon Agama Terhadap Globalisasi Ekonomi

5.1. Agama-agama Dunia Menentang Globalisasi Ekonomi

Selain akan pengaruh globalisasi ekonomi terhadap kemiskinan ini, maka agama-agama dunia (Islam, Katolik, Hindu, Buddha) pada umumnya menentang kebijakan ekonomi global dan pasar bebas. Banyak agama menunjukkan sikap resistensi terhadap globalisasi ekonomi. **Di Mesir, kekecewaan terhadap pembangunan telah melahirkan gerakan berhuruf kapitalisan yang** disebut oleh Mamonur Fakih sebagai gerakan "fundamentalisme Islam". Di India, resistensi terhadap globalisasi ekonomi dan pasar bebas **mempuncu pada kelahiran Hindu Revivalis yang menentang liberalisasi perdagangan barang-barang buatan asing.** Sikap resistensi agama terhadap globalisasi ekonomi dan pasar bebas juga diungkapkan oleh

Norena Heertz ketika melukiskan bagaimana terfiksinya identitas masyarakat Buddha di kerajaan Bhutan yang terletak di antara Tibet dan India. Menurutnya, masyarakat Bhutan ialah sebuah gaya hidup yang sederhana sebagai komunitas dan hedonis karena globalisasi. Sementara itu, resistensi Katolik terhadap globalisasi ekonomi terlihat dari sikap Paus Johannes Paulus II yang menugutkannya kembali ke komunitas-komunitas lokal, masjid, dan terjemah dari, bukan komunitas yang didominasi perusahaan multinasional, pasar modal, dan lembaga internasional seperti IMF dan WTO (Manour, 2003; Harris & Dady, 2002).

Agama Islam merupakan pemegang palang kuat terhadap globalisasi ekonomi dan pasar bebas. Sebab Islam melihat dirinya sendiri sebagai sebuah ideologi yang ingin menggantikan mazah neoliberalisme yang merupakan ideologi dasar dan spirit dari globalisasi ekonomi dan pasar bebas. Hifzur Tabir bahkan menggunakan nama gerakan Islam Internasional untuk mengembangkan ideologi Islam untuk menggantikan ideologi kapitalisme dan neoliberalisme dengan Islam. Tabir yakin bahwa Islam ialah kebaikan yang diturunkan Allah **Salam hanya untuk umat Islam**, namun juga untuk **sekaru** umat **manusia**. **Kemahli**, ia ingin membebaskan setiap manusia dari cengkaman globalisasi ekonomi dan pasar bebas dengan menggarakan ajaran dan kepercayaan Islam sebagai dasar perjuangan pembebasan ini (Manour, 2003; Harris & Dady, 2002).

5.2. Keberpihakan Agama Kepada Kaum Miskin

Tidak cukup bagi institusi agama untuk menyuarakan sikap resistensi terhadap globalisasi. Manour (2001) berpendapat bahwa banyak agama menunjukkan sikap resistensi terhadap globalisasi ekonomi dan pasar bebas. Tetapi sikap resistensi saja tidak cukup mengingat hal penting, mendesak dan paling dibutuhkan masyarakat saat ini ialah pelaksanaan peran dan fungsi kenabian agama sebagai kritik dan agen pembaharuan sosial demi kepentingan kebarga dan masyarakat kecil.

Banyak teolog dan sosiolog telah memberi pemisahan tentang peran dan fungsi kenabian agama di tengah masyarakat. Durkheim, misalnya berpendapat bahwa agama merupakan faktor essential bagi identitas dan integritas masyarakat. Dengan kata lain, agama adalah suatu sistem simbol dimana masyarakat bisa menjadi tatar akan dirinya dan cara pikirnya sebagai suatu eksistensi kolektif. Sistem simbol ini terpusat pada martabat manusia sebagai pribadi, kesejahteraan umum dan norma etik (Bohong,

2007; Toba & Khairul, 2008). Sadar akan hakikat agama sebagai kekuatan kolektif ini maka, agama memiliki dalam dirinya sendiri kekuatan luar biasa untuk memobilisasi kekuatan kolektif untuk melawan ketidakadilan dimana sebagian besar kekayaan dunia hanya dikuasai dan dikontrol oleh segelintir orang yang bermodal besar dan memiliki akses kepada kekuasaan. Perjuangan itu diarahkan kepada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan umum.

Agama memiliki otoritas untuk menilai tatanan sosial saat sekarang serta mengarahkannya kepada gambaran masyarakat ideal yang perlu diperjuangkan melalui suatu gerakan bersama. Max Weber menegaskan bahwa agama memiliki otoritas tersendiri untuk mewujudkan suatu masyarakat ideal. Alasannya ialah nilai keagamaan yang dihayati para penganutnya akan memberikan wujud dan perilaku, motivasi, semangat kerja keras dan nilai-nilai kemanusiaan yang dibutuhkan untuk perubahan dan pembaharuan demi suatu kehidupan yang lebih baik dan manusiawi. Singkatnya agama menjadi sumber strukturalisasi masyarakat (Belong, 2007; Toba & Khairul, 2008). Menghadapi situasi kemiskinan yang berakar pada ketidakadilan sosial dalam era global ini, agama yang memiliki otoritas sebagai agen transformasi sosial harus berani mengkritisi ketidakmerataan distribusi sumber daya modal, teknologi serta kekayaan minimal seperti minyak dan gas yang dieksploitasi dan dimonopoli segelintir orang demi kepentingan sesak. Dasar dari kritik sosial ini terletak pada keyakinan bahwa Allah menciptakan dan memberikan kekayaan di dunia ini tidak hanya untuk segelintir orang melainkan untuk semua umat manusia.

Agama memiliki hubungan yang sangat erat dengan penciptaan budaya. Hal ini terjadi ketika manusia menerapkan akal budinya dalam kehidupan sosial dengan tujuan membawa masyarakat kepada perubahan dan pembebasan hidup misalnya dari belenggu kemiskinan. Nilai-nilai keagamaan yang dihayati dan diamalkan dengan sungguh-sungguh akan membawa seseorang kepada pembebasan ini. Demi mencapai hal ini, dibutuhkan suatu visi kamabian yang mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk berjuang bersama membebaskan diri dari kemiskinan, kebodohan, sikap apatis dan apolitis yang saat ini berakar kuat dalam politik ekonomi global dan pasar bebas. Misi pembebasan ini sebenarnya merupakan amanat Allah kepada manusia sejak dahulu kala mulai dari zaman para nabi sampai dengan hari ini sebagaimana tertuang dalam

kitab Suci dan ajaran masing-masing agama (Bolong, 2007; Toha & Khairul, 2008).

Prinsip utama kepedulian terhadap keluarga, masyarakat kecil dan miskin yang perlu dipegang oleh setiap institusi agama ialah kejujuran, ketertarikan, keadilan dan pengorbanan. Keluarga dan masyarakat miskin adalah orang yang harus dibantu dan bukannya untuk dieksploitas atau ditindas. Tujuan tersebut perlu mengedepankan semangat toleransi, menghindari pertentangan, mempromosikan cinta, membangun persaudaraan, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial, memperjuang tinggi martabat manusia, menciptakan pikiran serta kesadaran baru yang terlibat dalam semangat kerja keras, ketekunan dan kesetiaan serta perilaku hidup benar (Bolong, 2007; Toha & Khairul, 2008). Pertanyaan berikutnya ialah bagaimana dan sejauhmana institusi agama katolik mengaplikasikan misi profetik-keagamaan ini?

5.3. Gereja Katolik dan Keberpihakan Kepada Kaum Miskin

Keberpihakan Gereja Katolik terhadap masyarakat dan keluarga miskin mendapat sorotan sangat khusus. Pierpina Gereja, khususnya pape Paus telah mengeluarkan ensiklik mengenai Ajaran Sosial Gereja dengan tujuan membela keluarga dan masyarakat miskin dan tertindas. Ensiklik *Quadragesimo Anno* misalnya telah memperjelas kepedulian Gereja yang begitu kuat untuk melayani dan memperhatikan kaum miskin. Gereja menolak semua bentuk eksploitasi terhadap masyarakat dan keluarga kecil yang dilakukan siapa saja terutama pemilik modal besar dan mereka yang berkuasa. Paus Yohanes Paulus II dalam *Mater Et Magistra* menegaskan bahwa cinta terhadap kaum miskin merupakan cinta yang berdasarkan Injil dan tidak keluar dari motivasi dan inspirasi sosio-ekonomi ataupun politik. Dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, Paus Yohanes Paulus II menegaskan pentingnya keberpihakan Gereja kepada kaum miskin melalui keterlibatan aktif memperjuangkan atau menggunakan kesejahteraan umum. Nilai perjuangan ini tidak dilakukan maka pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi, politik, budaya dan lain-lain dapat menjadi sumber pemiskinan dan penindasan oleh segengsi orang (Hartawiryana, 1999).

Ajaran dan seruan Gereja Katolik untuk membela kaum miskin dan tertindas merupakan suatu bentuk keberpihakan Gereja paling konkrit terhadap masyarakat dan keluarga miskin. Keberpihakan ini tidak hanya

ditunjukkan melalui kata-kata, serta, perakuan kasih dan memberi sedekah, tetapi juga dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kritis agar mereka sendiri mampu membebaskan diri dari kemiskinan hidup serta situasi sosial politik, ekonomi dan budaya yang membuat mereka miskin. Untuk hal ini, para pendidik dan pembina iman dituntut selain memiliki pengetahuan dan keterampilan memberi pendidikan dan pengajaran agama secara kreatif dan transformatif, tetapi juga membantu mengatasi persoalan kemiskinan secara konkrit seperti melalui program kredit mikro, koperasi dan Credit Union. Lebih dari itu, para pembina iman perlu memiliki kepekaan dan pengetahuan tentang situasi sosial dan ekonomi global saat ini dimana negara-negara maju dan perusahaan multinational terus memonopoli seluruh bisnis dan sumber perekonomian dunia (Bakong, 2007; Toha & Khairul, 2008).

Kasih dan keberpihakan kepada masyarakat kecil dan miskin telah ditunjukkan Yesus sendiri ketika memberi makan lima ribu orang lapar dan haus yang mengikuti Dia (Injil Mat 14: 13-21; Mrk 6:30-44). Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya mengajarkan cinta kasih dengan kata-kata melainkan juga perbuatan konkrit dengan memberi makan kepada orang lapar. Yesus menghendaki agar Gereja dan para murid-Nya melakukan hal yang sama terhadap masyarakat kecil dan miskin. C.A (Centesimus Annus) No. 57 menegaskan bahwa amanat sosial Injil tidak dapat dipandang sebagai suatu teori melulu, melainkan sebagai dasar yang nyata dan motivasi untuk bertindak menolong orang miskin dan bertindak agar bisa keluar dari kemelaratan dan ketertindasan.

Bagi Gereja Katolik, perhatian dan kepehatinan kepada masyarakat kecil dan miskin perlu dilihat sebagai kesempatan untuk beramal kasih, memperkaya keadilan, mencegah berbagai konflik dan kerusuhan yang timbul di tengah umat. CA 58, mengartikan bahwa cinta kasih terhadap kaum miskin diwujudkan secara nyata dalam usaha memperjuangkan keadilan. Keadilan tidak akan tercapai apabila, selama orang miskin yang meminta bantuan untuk memperoleh hidup yang layak dianggap sebagai suatu beban, dan bukannya sebagai kesempatan beramal serta memperkaya keadilan. Misi keadilan dan pembantuan ini merupakan amanat Allah yang telah disampaikan sejak zaman para Nabi dan mencapai puncaknya dalam diri Yesus yang turun ke dunia, hidup dalam kesederhanaan, berjuang memperoleh keadilan bagi orang miskin hingga wafat di salib.

Penutup

Globalisasi ekonomi dan pasar bebas merupakan sumber kekayaan bagi pemilik modal besar dan mereka yang memiliki akses kekuasaan, sebaliknya menjadi sumber pemiskinan dan mala petaka bagi kebanyakan keluarga dan masyarakat kecil. Para intelektual negara-negara berkembang sepakat bahwa globalisasi ekonomi merupakan mesin kapitalis yang memproduksi kemiskinan global karena telah menengras sebagian besar dari kekayaan dunia. Menghadapi kenyataan ini, perlu dilakukan reformasi hukum terutama yang terkait dengan hukum perdagangan bebas dan pembukaan akses pasar.

Peningkatan mutu kehidupan sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta upaya mencari solusi atas masalah kemiskinan akibat kebijakan ekonomi global dan pasar bebas merupakan misi profetik dan tanggung jawab semua agama dan umat beriman. Alasannya ialah agama merupakan sesuatu yang bersifat sosial. Oleh karena itu masing-masing institusi agama perlu berusaha sekuat tenaga menginterpretasi dan mengaplikasikan misi profetik keagamaan secara kontekstual dan relevan. Agama Katolik sebagai suatu institusi agama di tengah masyarakat dunia mempunyai tugas dan tanggungjawab profetik untuk membela dan membebaskan keluarga dan masyarakat yang kurang beruntung dari kemiskinan dan ketertindasan melalui bantuan karitatif maupun pembudayaan sosial ekonomi, politik, kesehatan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Khomsan. Masalah Gizi Sebagai Beban Ganda. Kompas, 26 April 2011
- Asis Dezzy A., 2005. Bom Waktu Itu Bernama Kemiskinan. Dalam: OTONOMI, No.1. Tahun II/2005
- Asis Dezzy A., 2005. Harga Sebuah Kemiskinan. Dalam: OTONOMI, No. 1. Tahun II/2005.
- Fakih, Mansour, *Sesat Pikir: Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Cetakan I. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2001**
- Globalisasi dan Kemiskinan. Republika, Selasa, 7 November 2006.
- Haris Murnandar & Dedy Priatna (peterj.) 2002. ***Arisingan Kapitalisme Global: Ekonomi Dunia Abad Ke-21***. Gilpin, Robert & Gilpin, Jean Millis. *The Challenge of Global Capitalism*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Himaharto Juwani. 2011. Undang Undang Dasar dan Dagang Bebas. Harian Kompas. 29 April 2011.
- Khudoi. 2011. Inflasi Pangan Dan Kemiskinan. Harian Kompas. Januari, 2011.
- Mansour Fakih. 2003. Bebas Dari Neoliberalisme. Insist Press, Yogyakarta.
- Prasetyantoko, A. 2001 *Aritektur Baru Ekonomi Global: Belajar dari Keruntuhan Ekonomi Asia Tenggara*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.**
- Nirami. 2008. Kegagalan Globalisasi: Meningkatnya Kemiskinan, Kelaparan, Depresi dan Kriminalitas. <http://infoindonesia.wordpress.com>
- Ola Rongan Wilhelms. 2009. *Pemberdayaan Sosial Ekonomi Sebagai Suatu Model Evangelisari Dalam Konteks Indonesia*: Penerbit WINA PRESS 2010.

Toha, Anis Malik dan Khairil Bayan. 2005. "Konsep World Theology dan Global Theology Ekspresi Doktrin Peralihan Agama". *Jurnal Indonesia*, Tahun I No-4, Januari - Maret 2005. Jakarta : Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS)

The International Forum on Globalization, 2004. Does Globalization Help the Poor?

Winarno, Budi. 2004. *Globalisasi Pijak Imperialisme Baru: Peran Negara dalam Pembangunan*. Tajulu Press, Yogyakarta.

Widyamartaya & AB Widyarta. 2004. *The International Forum on Globalization: Does Globalization Help the Poor?*. Yogyakarta, Cendekia Pustaka Rakyat Cerdas.

Rais, Muhammad Amien. 2008. *Agenda-Mendatuk Bangsa Selamatkan Indonesia!* PPSk Press, Yogyakarta.

Vivian Alata. 2011. Inflasi Memucak Kemiskinan. *Harian Kompas*, 28 Januari 2011.

Yusman, Muhammad Ihsani. 2008. *Globalisasi, Kemiskinan dan Agama*. Makalah. Dicaripakan dalam Konferensi Internasional dengan tema: *Globalization: Challenge and Opportunity for Religious Universities Gajah Mada*, 2 Juli 2008.

KELUARGA KRISTIANI DAN RELASI PERSAUDARAAN DALAM DINAMIKA TEKNOLOGI KOMUNIKASI

JS. Wibowo Singgih
STKIP Widya Yuwana Madina

ABSTRACT

Perkembangan teknologi komunikasi yang berbasis elektronik mengakibatkan dunia saat ini berubah bentuk menjadi sebuah desa global. Dalam desa global ini, identitas manusia akan bergeser dari identitas individualistik dan fragmentaris kepada individu kolektif. Jejaring komunikasi global di satu sisi telah mengkondisikan hampir setiap penduduk bumi termasuk keluarga-keluarga Kristen untuk memanfaatkan jejaring komunikasi sebagai sarana pengembangan diri, keluarga, relasi sosial dan perumularaan. Di sisi lain, kemajuan ini juga mengakibatkan tidak sedikit pergeseran paham tentang iman dan persediaan terkait dengan iman dan kemanusiaan yang tersebar luas karena bantuan komunikasi global. Seder akan hal ini maka, keluarga-keluarga Kristen diuntut mengambil sikap yang tepat dalam menggunakan jasa komunikasi global. Sikap yang tepat terletak pada usaha menjadikan media sebagai sumber dukungan, stimulus dan inspirasi untuk menjadikan setiap keluarga Kristen sebagai bagian dari komunitas iman dan cinta kasih Kristen.

KEY WORDS: *Keluarga Kristiani, Komunikasi Global, Relasi Persaudaraan, Komunitas Iman dan Cinta*

Pengantar

Harold Lasswell, seorang ilmuwan politik, yang turut melahirkan teori komunikasi di Amerika pada era perang dunia II, mengatakan dalam dictumnya bahwa komunikasi adalah persoalan "*Who says what, to whom, in which channel with what effect*" (Watson, 1998). Dictumnya yang padat ini tampaknya mengandung semua unsur yang diperlukan atau hadir ada dalam proses komunikasi apapun: komunikator (*who*), pesan komunikasi (*what*), komunikan (*to whom*), media perantara (*channel*) dan akibat/pengaruh dari kegiatan komunikasi itu (*with what effect*). Dewasa ini aktifitas komunikasi telah diperkuat oleh kemajuan sistem teknologi yang luar biasa. Kegiatan komunikasi menjadi sesuatu yang sangat mudah.

Marshall McLuhan, pakar teori media dari Universitas Toronto (1960-an) meramalkan bahwa dengan perkembangan teknologi komunikasi yang berbasis elektronik mengakibatkan bumi ini pada masa hari kelak akan menjadi sebuah desa global (*global village*), di mana media elektronik akan mengambil alih budaya visual dari oral. Pada masa itu manusia akan bergeser dari identitasnya yang individualistis dan fragmentaris kepada suatu individu yang bersifat kolektif (Litajober, 2005). Dewasa ini, situasi kehidupan di dunia ini telah menjadi sebuah keadaan seperti apa yang diramalkan McLuhan sekitar setengah abad lalu. Kita berada dalam sebuah wilayah yang "tanpa batas" karena teknologi komunikasi telah mengatasi "ruang dan waktu" relasi antar manusia, penghuni planet bumi ini.

Jejaring komunikasi global telah mengondisikan hampir setiap pribadi penduduk bumi ini untuk memanfaatkan jejaring komunikasi ini. Sebuah survey kecil terhadap sejumlah orang (anak-anak, remaja, dewasa, manula, laki-laki dan perempuan) menunjukkan bahwa lebih dari 75% dari mereka merasa senantiasa berada dalam "keterthubungan" dengan jejaring global itu.

Keluarga-keluarga kristiani dan relasi sosial serta peradaban yang mereka bangun juga tidak bisa terlepas dari konteks jejaring komunikasi global. Situasi ini menyebabkan tidak sedikit keluarga-keluarga kristiani serta anggota keluarganya bernafas faham dengan anggota keluarga lain karena kurangnya kefahaman konsep tentang kemajuan teknologi komunikasi itu sendiri. Saat ini telah muncul gap antara generasi yang telah mapan dengan budaya visual-oral dengan generasi yang dilahirkan dalam

lingkungan "global village". Generasi visual-oral melarang supaya manusia tidak boleh terlalu banyak masuk ke dalam jejaring global saat ini karena dimulainya sangat berbahaya. Sementara itu generasi global-village merasa hidupnya begitu tergantung pada lingkungan global ini.

Kemajuan iptek di satu pihak telah membawa komunikasi sampai pada tingkat sistem yang sangat modern. Di lain pihak sistem komunikasi global juga menuntut setiap pengguna termasuk keluarga-keluarga Kristen untuk mengambil suatu sikap ketika berhadapan dengan situasi jaman komunikasi global seperti sekarang ini. Pertanyaannya ialah: Apa itu teknologi komunikasi global? Sikap apa yang perlu diambil ketika berhadapan dengan komunikasi global saat ini? Siapa kiranya yang bisa dijadikan teladan dalam hal sikap dan kebijakan menghadapi komunikasi global? Bagaimana sikap dan ajaran kuasa Gereja tentang komunikasi global? Bagaimana kiranya pendampingan yang diberikan oleh kuasa mengajar Gereja kepada gereja-gereja domestika yang tersebar luas di seluruh muka bumi ketiga Gereja-gereja domestika ini berhadapan dengan penerapan komunikasi global? Marilah kita menilikikannya sejenak!

1. Teknologi Komunikasi Dalam Konteks Globalisasi

Teknologi komunikasi merupakan alat/sistem mutakhir yang bisa mempercepat dan mempermudah proses penyampaian pesan. Proses akselerasi dan mempermudah teknologi komunikasi tidak bisa terlepas dari kaitannya dengan Teknologi Informasi (TI). Pembicaraan tentang kedua hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari situasi "ambiance" atau globalisasi saat ini. Banyak kajian sosial yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri dalam kisaran 1 dasa warsa terakhir ini telah memusatkan perhatiannya pada berbagai dampak yang muncul dalam masyarakat karena hadirnya "tritunggal": teknologi informasi, teknologi komunikasi dan globalisasi.

Istilah Globalisasi diangkat dan dipopulerkan oleh Theodore Levin melalui tulisannya mengenai "Globalization of Markets" dalam "Harvard Business Review" edisi bulan Mei-Juni 1983. Tulisan ini dirumuskan dalam konteks politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan (Ruwf Abdels, 2003).

Menurut sejarahnya, istilah globalisasi muncul akibat adanya peristiwa revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik mengakibatkan akselerasi komunikasi, transportasi,

produksi, dan informasi. Sebaliknya, disintegrasi negara-negara komunis yang mengakhiri perang dingin memungkirkan kapitalisme Barat menjadi satu-satunya kekuatan yang memangku hegemoni global. Inilah sebabnya di bidang ideologi perdagangan dan ekonomi, globalisasi sering disebut sebagai De-kolonisasi (Oommen), Re-kolonisasi (Oliver, Balasuriya, Chaudhri), Neo-Kapitalisme (Mason), Neo-Liberalisme (Ramakrishnan). Malahan Suda menyebut globalisasi sebagai eksistensi Kapitalisme Ekso-Amerika di dunia ketiga.

Jacques B. Gellinas, seorang sosiolog Kanada, dengan sangat menarik melukiskan dalam salah satu bagian bukunya yang berjudul "*Juggernaut Politics-Understanding Predatory Globalization*" bagaimana sikap terjang keganasan globalisasi di muka bumi ini dibandingkan sebagai sosok Juggernaut, sebuah simbol dalam masyarakat Hindu (India) yang menggambarkan sebuah wahana atau pasukan yang dikategorikan sebagai 'tak terkalahkan', yang akan menghancurkan apapun yang dilalui dengan kekuatannya (Gellinas, 2003). Globalisasi dengan segala aspek dan implikasinya saat ini terasa sekali telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan manusia di seluruh muka bumi ini. Seolah-olah siapa pun tidak bisa memilih untuk mengatakan "tidak" pada tekanan globalisasi ini.

2. Globalisasi, Sebuah Kemincayaan Sejarah

Gejala globalisasi sudah cukup lama dipandang bukan hanya sebagai sebuah kenyataan, tetapi juga sebagai suatu kemincayaan sejarah peradaban manusia. Pengalaman menunjukkan bahwa saling keterkaitan dan jalinan hubungan antara semua penghuni planet bumi ini semakin mengalami percepatan. Pada tataran masyarakat dan bangsa, banyak kenyataan membuktikan bahwa kemincayaan jalinan hubungan interaktif antara masyarakat atau bangsa yang satu dengan yang lain semakin sulit dihindarkan. Di satu sisi, gejala ini sebenarnya merupakan penegasan terhadap dinamika hubungan antar manusia dan antar bangsa yang sudah sejak lama sekali berkembang. Namun di sisi lain, gejala ini juga tampaknya membawa hal-hal yang dapat dikatakan sama sekali baru.

Pada abad ke 16-20 bangsa-bangsa Barat (Eropa: Portugal & Belanda) menjelajah ke dunia Timur dan kerudian menguasainya. Hal ini mengakibatkan bangsa-bangsa Timur mulai mengenal (peradaban) bangsa Barat dan juga sebaliknya. Bersamaan dengan hal ini, bangsa-bangsa Barat juga mulai "menemukai" dunia baru termasuk benua Amerika. Tetapi jauh

sebelum itu, para pedagang Parsi (Iran sekarang) sudah menjalin kontak perdagangan, informasi dan kebudayaan dengan bangsa Cina. Pada saat itu beberapa kota pantai yang berada di wilayah negara yang sekarang disebut Indonesia sudah menjadi pusat-pusat perdagangan. Kota pantai itu antara lain Pami, Delhi, Banten, Cirebon dan Jepara. Jalimn hubungan perdagangan, kebudayaan dari menyuml politik antara masyarakat dan penguasa di berbagai wilayah Nusantara dengan India dan Cina telah berlangsung jauh sebelum bangsa-bangsa Barat berlayar ke Timur.

Kendati gejala dan proses-proses globalisasi sudah lama berlangsung dan mawarnai sejarah peradaban dan hubungan antar manusia, namun upaya-upaya untuk memahaminya sejauh ini ternyata tidak selalu mudah. Globalisasi dapat diberi arti secara betagan karna masing-masing bangsa, masyarakat, bahkan juga individu memiliki sudut pandang berbeda tentang globalisasi. Globalisasi antara lain dicitikan sebagai:

"both a journey and a destination: it signifies a historical process of becoming, as well as an economic and cultural result: that is arrival at the globalized state" (Ferguson, 2002:239).

Definisi ini bisa menimbulkan banyak persoalan ketika orang mulai bertanya: betulkah akan tercipta suatu keadaan yang benar-benar mengglobal? Sejarah mana? Apakah orang-orang di Amerika juga akan makan geblok plus tempe bengak (dari Kuku Progo, DIY)? Apakah akan semakin banyak orang London, Sidney atau Aachen yang mempelajari, misalnya tari Bedhoyo Ketawang? Apakah orang-orang Munchen juga akan sangat menyukai pecel lele atau pecel wader seperti yang bisa didapat di lembah sungai di area Gase Dungsu Madian?

Banyak kalangan ilmwan lebih condong memandang globalisasi sebagai proses-proses perubahan struktural. Karena ini gagasan tentang "penajapan ulang terhadap struktur dan tatanan dunia" menjadi sangat penting. Sebagian ilmwan berpandangan bahwa globalisasi merupakan suatu proses menuju satu dunia dengan karakter perubahan orientasi budaya yang berlangsung secara terus menerus dan membawa manusia kepada:

"the whole earth as the physical environment, everyone living as world citizen, consumers and producers with a common interest in collective action to solve global problems" (Albro, 1990, sebagaimana dikutip Ferguson, 2002: 239).

Definisi ini terkesan sangat indah, tetapi apakah akan bisa demikian keadaannya? Apakah kalangan Barat (Eropa dan Amerika Utara) yang notabene memegang hegemoni tidak akan lagi menggulingkan pemerintahan negara lain yang dinilainya sebagai penghalang bagi tercapainya "kepentingan nasional" barat dengan mengatamiskan, misalnya, demokrasi atau HAM?

Kalangan Postmodernist memiliki pandangan yang lain lagi. Kelompok ini lebih cenderung melihat globalisasi sebagai suatu gejala timbul dan berkembangnya budaya bersama (*common culture*) terutama berkaitan dengan pola-pola konsumsi dan gaya hidup. Pandangan ini telah memungkinkan adanya perkembangan pemikiran yang cenderung mengafirmasi proses-proses integrasi dan disintegrasi budaya lintas masyarakat (*transsocietal process of cultural integration and disintegration*). Sebagian kalangan postmodernist bahkan telah memberi penekanan pada *cultural diversity in global unity* (Featherstone, 1991, dalam Ferguson 2002: 240). Pandangan ini terkesan lebih bisa diterima karena dinilai lebih adil. Namun mengingat adanya upaya memodifikasi secara terencana unsur-unsur budaya demi kepentingan pemasaran dan permodalan para kapitalis maka pandangan itu pertambahan-lebihan kehilangan dimensi keadilan dan normatif yang dimilikinya.

3. Aksentuasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Ditinjau dari perspektif sejarah, era globalisasi dibubuhi oleh sebuah periode kehidupan yang ditandai oleh adanya gelombang internasionalisasi. Periode tersebut dapat dikatakan sebagai cikal-bakal dari apa yang kemudian dikenal dengan istilah globalisasi. Gelombang internasionalisasi ini dapat dibagi ke dalam 3 fase. Fase yang pertama merupakan era kolonialisme (tahun 1498 s.d. 1763), dengan imperialisme sebagai pilar utamanya. Pada era ini sejumlah negara Eropa menyebar ke berbagai wilayah baru dengan menggunakan berbagai fasilitas dari para raja. Fase yang kedua (tahun 1763 s.d. 1883) ditandai oleh lahirnya kapitalisme yang dibidai oleh munculnya revolusi industri. Periode ini didominasi oleh fenomena konglomerasi dan eksploitasi, serta penghinaan atas dunia ketiga. Fase ketiga (tahun 1883 s.d 1980) merupakan fase *international trade*, dengan agen utamanya adalah Multinational Corporation (MNCs). Era setelahnya, yakni tahun 1980 sampai dengan hari ini lebih dikenal sebagai era globalisasi.

Di awal tahun 1980-an Multinational Corporations (MNCs) berubah nama menjadi Transnational Corporations (TNCs). Nama dan kapasitas finansial maupun teknologi yang dimiliki TNCs membuatnya mampu beroperasi dan berpengaruh mengatasi batas-batas kekuasaan bangsa dan negara mana pun. Kurang dari 10 tahun berjalan, perusahaan-perusahaan raksasa dunia mulai beroperasi di Indonesia, terutama sejak era orde baru. Kehadiran perusahaan trans-nasional (TNCs) di Indonesia pada waktu itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi, khususnya sektor industri manufaktur, yang diharapkan pada waktu itu dapat menyediakan lebih banyak lapangan kerja. Namun kehadiran TNCs sejauh itu tidak membawa banyak dampak positif terhadap pembangunan ekonomi sebagaimana semula diharapkan. Sebaliknya, kehadiran TNCs dalam banyak hal justru melahirkan eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan serta mengancam keberadaan industri-industri dalam negeri yang sudah dirintis sebelumnya. TNCs pada akhirnya juga merambah ke berbagai sektor, termasuk perbankan, dan bahkan pertanian sehingga melahirkan ketegangan ekonomi.

Teknologi komunikasi dan sistem informasi mengalami kemajuan sangat dramatis pada periode ini: mulai dari wahana Teknologi Informasi (TI) yang paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi, hingga internet dan telepon genggam dengan protokol aplikasi tanpa kabel (WAP). Kemajuan tersebut menjadikan sistem komunikasi dan informasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang kesadaran banyak orang. Up date informasi pada saat sekarang ini tidak lagi dalam skala minggu, hari atau jam, melainkan dalam skala menit atau bahkan detik.

TI telah mengubah wajah ekonomi konvensional yang relatif lambat dan masih mengandalkan interaksi sumber daya fisik secara lokal menjadi ekonomi digital yang serba cepat dan mengandalkan interaksi sumber daya informasi secara global. Peran internet tidak bisa dipungkiri dalam hal penyediaan informasi global sehingga dalam derajat tertentu TI bisa diidentikkan dengan internet. Kehadiran internet sendiri memang fenomenal sebagai salah satu pilar penyangga kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Internet telah menghilangkan semua batas fisik yang memisahkan manusia dan menyatakannya dalam dunia baru, yaitu dunia "maya".

Setara dengan perkembangan perangkat keras komputer, khususnya mikro-prosesor, dan infrastruktur komunikasi, teknologi komunikasi dan

sistem informasi berkembang dengan kecepatan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Konsep perniagaan elektronik melalui internet, yang sering dikenal dengan istilah *e-commerce* yang lahir karena penggabungan TI dengan globalisasi ekonomi belum lagi genap berusia lima tahun, harus merelakan dirinya dirindih oleh konsepsi *e-business*, dengan sistemnya yang lebih canggih.

Meresponi ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju, pada bulan Juli 2000 diselenggarakan pertemuan *Asian Regional Conference of the Global Information Infrastructure Commission (GIIIC)* di Manila. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah rencana untuk membangun jaringan komunikasi, menyinkronkan perangkat pengakses internet dari internet untuk masyarakat, menyuarai *pro-se-ori* penggunaan TI, membangun jaringan online-pemerintah, serta mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan daya saing Asia di panggung dunia.

Di Indonesia sendiri, pada awal lepas landas menuju era globalisasi, yakni sekitar satu dasawarsa yang lalu, Tabloid Kontan *on-line* edisi 9 Oktober 2000 seperti yang dikutip dari *Information Data Corporation (IDC)* mengatakan bahwa dana yang sudah dibelanjakan untuk kepentingan TI di Indonesia cukup besar. Pada tahun tersebut diperkirakan US\$ 772,9 juta (Rp. 7.729.000.000.000,-) habis terpakai untuk membeli TI. Anggaran tersebut tampak naik dibandingkan dengan anggaran dari tahun sebelumnya, yakni sebesar US\$ 638,4 juta (Rp. 6.384.000.000.000,-). Dari US\$ 772,9 juta itu, sebagian besar (57,7%) dipakai untuk membeli perangkat keras seperti *Personal Computer (PC)* dan *notebook*, dan 14,4% untuk belanja perangkat lunak. Seharusnya angka belanja keperluan perangkat lunak jauh lebih besar daripada pembelajaran perangkat keras. Namun hal ini tidak terjadi karena diduga keras di Indonesia tingkat pembajakan perangkat lunak (program-program) masih di atas 90%.

Kemajuan teknologi komunikasi dan sistem informasi, dengan segala aspek dan ciri-cirinya telah memandai jaman yang dilaluinya. Kehadiran digitalisasi dari proses komputerisasi dewasa ini mengakibatkan dunia menyebut dirinya hidup dalam sebuah era/abad digital. Kehadiran sistem internet di tengah-tengah masyarakat telah membuat banyak hal di dalam masyarakat terlihat seolah-olah sebagai realitas yang sesungguhnya. Kita senantiasa berhadapan dengan dan sedang mengembara di dunia maya. Kehadiran IT membuat hidup manusia tidak bisa terlepas dari "jejaring

sosial” (social-networking) dan bebas dari informasi yang terus membanjiri kita saat ini. Abad dasar itu maka abad ini kita sebut sebagai abad informasi atau *information society* (Valentisen, 2015).

Hari ini kita tidak bisa menghindari diri dari pemakaian perangkat sistem komunikasi modern. Televisi pada era tahun 1970an masih menggunakan teknologi transistor dan warna hitam-putih, dan juga masih memerlukan sebuah wadah yang relatif besar untuk kemampuannya. Dewasa ini televisi sudah didukung oleh teknologi *satellite-digital*, sistem pewarnaan yang sempurna, dan keberadaannya bisa dialihasikan pada perangkat-perangkat lain seperti misalnya telepon selular (*hand phone*), media-media keluarga digital besar dan media internet. Dengan adanya terpaan pesan-pesan yang dibawa oleh televisi mengakibatkan pola hidup anggota keluarga dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai tayangan yang disajikan oleh sekian banyaknya stasiun televisi yang hadir di tanah air kita tercinta ini. Sekitar satu dasawarsa yang lalu sarana komunikasi masih berteknologi kabel. Kita ingat penis di tahun-tahun itu sekurang-kurangnya setiap keluarga hanya memiliki 1 telepon rumah. Rupanya orang masih sangat berhati-hati menggunakan karena biaya penggunaannya masih sangat mahal, terutama biaya untuk percakapan interlokasi yang masih ditata dalam area zona 1, zona 2 dan zona 3. Sekarang situasinya sudah sangat berbeda. Dalam keluarga yang terdiri dari 3 anggota bisa jadi kita menyaksikan lebih dari 6 telepon selular ada di dalamnya. Biaya perawatannya pun tidak lagi semahal seperti di era awal tahun 2000an yang lalu, di mana kita masih mengenal istilah *roaming*. Dewasa ini setiap orang ayik dengan *hand phone* masing-masing, seolah-olah tidak waktu yang terlewatkan tanpa menggunakan peralatan ini. Sementara itu untuk media baru internet: siapa di hari ini tidak mengenal internet? Sebagian besar masyarakat kita sudah harus mengandalkan internet untuk aktivitas mereka sehari-hari. Hampir semua hal yang kita butuhkan saat ini bisa kita temukan di dalam sistem internet.

4. Keluarga Kristiani Dalam Terang Konsili Vatikan II

Dalam konteks Gereja Katolik, pembahasan mengenai keluarga sangat erat hubungannya dengan diskusi mengenai perkawinan. Selama berabad-abad lamanya paham Katolik mengenai keluarga perkawinan sangat dipengaruhi oleh konsep negatif tentang tubuh dan seksualitas. Apa yang diringkapsikan oleh St. Paulus, “kalian mereka tidak dapat menguasai

diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu (1 Kor 7:9)". Selanjutnya, St. Thomas Aquinas (1225-1274)¹⁷ mengatakan, persetubuhan tanpa kemungkinan menghasilkan keturunan merupakan dosa melawan kodrat dan sama jahatnya dengan perbuduhan". Pandangan-pandangan seperti ini tentunya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh alam pikiran dan praktik masyarakat sekitarnya. Tidak sedikit ahli hukum Gereja dan teolog mengamat pendapat bahwa "perkawinan adalah obat penawar bagi nafsu binah". Kitab Hukum Kanonik 1917 masih melihat perkawinan tidak berkeluarga sebagai sebuah "kontrak tidak berama".

Konili Vatikan II memandang cara hidup keluarga / perkawinan kristiani secara sangat berbeda dengan pandangan Gereja sebelumnya. Terinspirasi oleh gagasan perkawinan dalam Kitab Suci, Konili Suci tidak hanya melihat perkawinan tidak berkeluarga sebagai suatu "kontrak" tetapi lebih sebagai "perjanjian" cinta-kasih antar pasangan seajar (GS, 47-52). Melalui pandangan baru ini, Konili Suci lebih memberi nilai yang lebih positif atas kehidupan berkeluarga. Perkawinan dilihat sebagai suatu hubungan cinta yang sangat personal antara pasangan suami-istri. Hubungan cinta ini melambungkan hubungan antara Allah dan umat-Nya dalam Perjanjian Lama, dan juga antara Kristus dengan Gereja-Nya dalam Perjanjian Baru (Ef 5:22-33).

Penghargaan Konili Suci terhadap keluarga-keluarga kristiani juga tampak jelas dari istilah "*Ecclesia Domestica*" (Gereja Rumah Tangga). Istilah ini dipakai untuk menyebut keluarga sebagai "Gereja Rumah Tangga" umat beriman. Keluarga disebut sebagai "Gereja rumah tangga" sebab di dalam keluarga itu orang tua berakunya dengan pekotaan maupun teladan menjadi pewaris iman pertama bagi anak-anak mereka; orang tua wajib memelihara panggilan hidup dari anak-anak mereka, khususnya panggilan rohani" (LG 11). Harapan mulia yang ada di balik Konili Suci dari istilah Gereja rumah tangga ialah terwujudnya keluarga-keluarga beriman sebagai sekolah kehidupan Kristen yang pertama dan "suatu pendidikan untuk memperkaya komuni" (GS 52). Selain harapan ini, Konili juga memberikan tugas yang tidak ringan pada setiap keluarga Kristiani. Setiap keluarga beriman kristiani dituntut membangun persekutuan cinta dengan setiap pribadi dalam keluarga; memberikan pendidikan iman yang baik kepada anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada orang tua, mempersiapkan, memelihara dan melindungi berbagai panggilan yang sudah

ditambahkan Allah dalam keluarga masing-masing, serta berperan aktif dalam kehidupan dan misi Gereja.

5. Keluarga Kristiani dan Perubahan Sosial Masyarakat

Umat beriman, baik secara pribadi maupun dalam kesatuan dengan keluarganya dipanggil untuk mewujudkan imannya dalam dunia nyata di mana mereka berada bersama masyarakat di sekitarnya. Permasalahannya adalah sejauh mana keluarga-keluarga kristiani bisa bertahan dalam iman di tengah perjalanannya menyusuri lorong-lorong kehidupan dunia yang terus menerus dirupa oleh badai globalisasi yang mengantarai beragam pesan melalui teknologi informasinya, seperti yang kita saksikan dewasa ini. Badai globalisasi, sejak kemunculannya, termasuk di Indonesia, terus-menerus tampak semakin menggaris dan menggeser pola-pola hidup masyarakat yang sebelumnya tampak tidak pernah bermasalah. Masyarakat kita sedang mengalami sebuah perubahan sosial karena terpaan globalisasi.

Banyak kenyataan menunjukkan bahwa globalisasi telah membawa berbagai dampak dan sekaligus tantangan terhadap kehidupan dan budaya masyarakat kita. Sampai tingkat tertentu teknologi komunikasi atau lebih tepatnya media massa pada kenyataannya terus melakukan penetrasi dan sekaligus mengportretasikan berbagai budaya asing, nasional dan lokal dengan akibat unsur budaya nasional dan lokal di seluruh penjuru tanah air nampak semakin memperoleh tendangan dan sebagiannya bahkan akhirnya memudar.

Gejala yang paling spektakuler ialah bahasa Inggris mulai digunakan sebagai bahasa percakapan dimana-mana. Bahasa Inggris tidak hanya digunakan di kampus-kampus perguruan tinggi dan forum-forum pertemuan (diplomasi, ilmiah atau bisnis) tetapi digunakan di gerobak-gerobak penjual ayam goreng, di lorong-lorong jalan dan jembatan sebagai "mahakarya graffiti" anak-anak iseng vandalis. Bahasa Inggris digunakan pula dalam percakapan sehari-hari dari kalangan elite dan selebritis, dan juga bahkan dipakai dalam lirik-lirik sebagian musik pop Indonesia. Kenyataan demikian sudah tentu menjadi tantangan (untuk tidak mengatakannya ancaman) bagi bahasa Indonesia yang merupakan unsur pokok dari kepribadian kebudayaan nasional bangsa kita. Lalu pertanyaannya ialah: akan dibawa ke mana bahasa Indonesia selanjutnya? Hal ini menjadi tanggungjawab semua warga bangsa Indonesia secara keseluruhan, dan bukan hanya para guru, dosen dan ahli bahasa dan sastra Indonesia.

Perihal lain yang tidak kalah penting ialah pola-pola konsumsi produk kebutuhan hidup sehari-hari dan gaya hidup. Sejak modal asing diperkenalkan masuk sebagai konsekuensi dari politik modernisasi pada awal dekade 1970an maka pola-pola konsumsi dan gaya hidup banyak kalangan masyarakat Indonesia mulai dan semakin terus berubah.

Iklan dan juga film mulai mempropagandakan pola-pola konsumsi dan gaya hidup baru. Di bidang kuliner, makanan dan jajanan yang berbahan pokok singkong (mohon diingat bahwa singkong adalah produk lokal/domestik yang ada di mana-mana dan tidak perlu didatangkan dari luar negeri/impor) berangsur diganti oleh makanan yang berbahan pokok tepung terigu (yang nota bene harus diimpor dari luar negeri). Sejumlah jenis minuman domestik seperti dawet, cam cao, dll harus bersaing dengan sejumlah minuman asing, seperti Fanta, Sprite, Cola, dll, yang perlahan-lahan menjadi minuman favorit anak-anak muda sekarang. Di bidang *fashion* kita menyaksikan bahwa lebih banyak warga masyarakat kita saat ini berbondong-bondong mendatangi mall-online untuk mencari celana dan baju impor (*jeans, levis, cordlove, dll*) yang siap pakai daripada harus pergi ke toko kain, memilih kain dan kemudian pergi ke tukang perjahit untuk diukur dan masih harus menunggu proses perjahitannya yang biasanya tidak kurang dari 1 minggu lamanya.

Dalam hal adat kebiasaan, tampaknya sudah agak lama kita menyaksikan, atau sebagian dari kita mungkin meratapi, gejala semakin keroposnya fondasi prinsip kegotongroyongan sehingga seringkali kita kesulitan dalam mengembangkan wacana ketahanan budaya. Sementara itu, nilai-nilai Pancasila terkesan semakin dilupakan. Pertujuan terhadap unsur-unsur luar kerap kali terlalu khusyuk dilakukan oleh sebagian masyarakat kita sehingga kita melupakan potensi dan keharusan berpijak pada potensi yang ada pada masyarakat/bangsa sendiri dalam mengembangkan strategi-strategi pembangunan bangsa.

6. Persaudaraan Sejati

Dasar keberhatian yang hakiki pada manusia adalah ketika disadari bahwa upaya membangun persaudaraan antara manusia merupakan suatu kebutuhan alamiah yang tidak bisa dihindarkan oleh siapa pun. Hubungan antar manusia yang didasari oleh persaudaraan universal, atau kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain merupakan jenis hubungan yang kuat dan ideal. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai

dasar bagi dan kekuatan untuk membangun persaudaraan universal manusia: 1). menumbuhkan rasa persaudaraan melalui suatu jalinan persaudaraan yang bersumber pada nilai-nilai etika kemanusiaan; 2). menjadikan hati nurani sebagai sandaran terakhir persaudaraan, bila sewaktu-waktu hubungan persaudaraan dihadapkan pada godaan-godaan materi yang bisa menghancurkannya; 3). hubungan persaudaraan harus dilasari oleh prinsip nilai-nilai kemanusiaan sebab nilai-nilai ini sejalan dengan hakikat hubungan persaudaraan dalam institusi moral apa pun, mengingat dasar dari semua ajaran moral adalah kebaikan dan ketamaan hidup.

Melaksanakan persaudaraan sejati berarti menanamkan kesadaran, kemampuan dan kerelaan setiap pribadi untuk memperhatikan, mendukung, menolong dan bekerjasama dengan pihak lain. Mustahil bagi kita untuk berbicara tentang persaudaraan tanpa peduli dan melakukan aktivitas apapun di lingkungan terdekat kita. Aktualisasi yang paling nyata bagi umat beriman di dalam mengembangkan persaudaraan ialah melibatkan diri dalam komunitas Gereja serta bersiap diri bergerak baik ke dalam maupun ke luar lingkup Gereja.

Bagi umat Katolik pengertian persaudaraan tidak sekedar membangun relasi dengan sesama umat kristiani dalam satu paroki atau dengan mereka yang sudah dibaptis menjadi anak-anak Allah dan saudara dalam komunitas kristen. Sebaliknya, persaudaraan kristen harus dimengerti dalam arti kasih kepada sesama sebagaimana diajarkan Yesus. Sabda Yesus: "... Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya" (1 Yoh 4:21). Sabda Kristus ini perlu dimaknai dalam konteks universal, artinya tidak terbatas pada iman atau agama yang sama.

Itulah lain untuk kita persaudaraan adalah solidaritas (*lativ: solidus* = kuat, utuh, tidak pecah), yakni saling memperhatikan dan menolong satu sama yang lain mengatasi batas-batas suku, bangsa dan budaya. Oleh karena itu, sikap saling memperhatikan dan menolong kiranya pantas dijadikan ukuran dasar ketika kita berbicara tentang persaudaraan, agar persaudaraan umat menjadi kokoh dan utuh. Penerapan sikap saling "memperhatikan" terungkap dalam keterbukaan untuk saling "menegur dan mengingatkan" dengan sesama kita yang mengalami kebingungan atau keceramasan. Hal ini akan membawa pencerahan yang menyejukkan serta kegembiraan dan kedamaian.

Pertanyaan yang tersisa sekarang ialah sejauh mana teknologi komunikasi terkini memiliki andil bagi relasi persaudaraan dalam keluarga-

keluarga kritiasi? Sudahkah sarana-sarana komunikasi yang ada dewasa ini menjadi jalan untuk menyapa dan saling memaafkan antara satu dengan yang lain? Di satu pihak, kita bisa melihat fenomena-fenomena positif sehubungan dengan hal tersebut. Media baru internet, misalnya, dapat membentuk sebuah kekuatan serta menggalang solidaritas masyarakat luas untuk melawan suatu otoritas yang menyalahgunakan kekuasaan serta bersifat korup.

Solidaritas dan dukungan itu bisa muncul melalui upaya pembentukan opini publik. Ketika opini publik sudah terarah pada dukungan yang sangat kuat bagi pihak yang lemah, para penguasa atau pemegang otoritas akan memperhitungkan kembali apa yang telah ditocarkan sehubungan dengan keputusan yang akan dijalankan dalam sebuah kasus hukum tertentu. Salah satu contoh, misalnya, kita masih ingat dengan baik bahwa sekitar akhir Agustus 2008, ketika masyarakat kita melalui jejaring sosial *face book* memberikan dukungan moral yang sangat luar biasa bagi kasus hukum Prita Mulyasari yang berhadapan dengan pihak Rumah Sakit Omni Tangerang. Di lain pihak, kita melihat tidak sedikit pemandangan yang memperlihatkan mengenai dampak negatif dari kemajuan teknologi komunikasi. Misalkan saja, begitu banyak keretakan rumah tangga yang diawali oleh hadirnya lebih dari satu sarana telekomunikasi (*hand phone*, misalnya) dalam sebuah rumah tangga. Intensitas pertemuan fisik antara anggota keluarga yang jauh lebih berkurang setelah sebagian dari masyarakat kita memanfaatkan sarana-sarana jejaring sosial sebagai sarana pertemuan mereka secara virtual.

7. Sikap yang Diperlukan

Cara berpikir bahwa globalisasi dan kemajuan iptek bernama berbagai implikasinya semata hanya membawa unsur-unsur jahat dan bencana dalam hidup manusia rasanya bukan saja tidak adil (*fair*) tetapi juga akan menimbulkan rasa frustrasi. Harus diakui bahwa setidaknya sampai tingkat tertentu, globalisasi juga akan membawa hikmah berupa unsur-unsur kebajikan, terutama membawa peluang untuk membangun jalinan kerjasama dengan masyarakat bangsa lain walaupun kerap kali memang tidak simetris. Kita harus menyadari bahwa sangat sulit bagi kita untuk membayangkan kapan proses-proses globalisasi akan berakhir dan apa yang akan terjadi kemudian. Sadar akan hal ini, keluarga-keluarga kritiasi sebagai bagian kecil dari keseluruhan masyarakat bangsa yang

sedang menghadapi terpaan arus globalisasi harus bisa membuat suatu pilihan dan berani mengambil sikap demi sebuah kebaikan bersama, terutama berkaitan dengan pembinaan dan ketahanan iman masing-masing anggota keluarga. Pertanyaan yang muncul adalah: Keluarga-keluarga kristiani harus bersikap bagaimana? Apa yang sebaiknya mereka lakukan? Acuan apa yang hendaknya dipakai dalam menyikapi tantangan globalisasi secara tepat agar pembinaan dan ketahanan imannya tetap terjamin dan terpelihara? Jawaban rasional atas pertanyaan ini ialah setiap anggota keluarga kristen secara individu, pribadi, maupun sebagai suatu komunitas Gereja keluarga perlu bekerjasama dengan Gereja maupun masyarakat secara bersungguh-sungguh menyongsong dan menghadapi proses-proses globalisasi, dan menetapkan sikap yang tepat terhadap setiap dampak dari globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan sistem informasi.

8. Konsili Vatikan II dan Masa Baru Gereja

Dari pengalaman perjalanan sejarah panjang Gereja katolik, tidak mudah bagi otoritas Gereja untuk menerima penemuan-penemuan perhal baru yang tidak selaras dengan ajaran Gereja yang sudah mapan. Sebagai salah satu contoh misalnya, ketika ajaran rasmi Gereja mengenai kosmos (tata surya) masih berkolot pada ajaran filsaf Aristoteles (faham geosentris) dan Kitab Suci Perjanjian Lama, otoritas Gereja dengan sangat mudah menyerukan "Anathema Sit", bahkan menjatuhkan hukuman excommunico kepada seorang Galileo Galilei (1564-1642) yang mengemukakan pendapatnya tentang tata surya yang berpusat pada matahari (faham heliosentris) dan bumi hanyalah salah satu planet yang mengelilingi matahari. Otoritas Gereja tidak mau menerima teod baru itu, tanpa berupaya melihat segala kemungkinan baru yang bisa terjadi.

Semenjak Konsili Vatikan II (1962-1965) Gereja bersikap lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai bentuk penemuan baru. Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II (Konstitusi, Dekrit dan Deklarasi) apabila ditelaah secara mendalam tampak di sana bagaimana Bunda Gereja telah membuka pintu dan jendela Gereja seluas-lebarnya terhadap perkembangan baru dan penemuan ilmu pengetahuan moderen. Akibatnya, umat di dalam Gereja dapat melihat ke luar dan udara serta angin dari luar dapat berhembus masuk ke dalam Gereja dengan segala dampaknya. Konsili Vatikan II telah meletakkan dasar bagi pengembangan pemikiran,

gerakan serta tindakan pembaharuan, pemerajaan dan pematapan yang sangat bermanfaat. Di atas Konsili suci tersebut, dibarengi keterbukaan, dialog, komunikasi dan kerjasama dengan semua golongan, semua aliran dan semua kelompok masyarakat. (KWI, 1993: DKV).

8.1. Dekrit Inter Mirifica

Inter Mirifica merupakan salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II. Dokumen ini berisikan ajaran Gereja tentang komunikasi sosial Gereja serta upaya-upaya yang dilakukan Gereja untuk meningkatkan komunikasi sosial dunia dan Gereja. Dekrit ini disetujui oleh Bapa Konsili dalam suatu pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara 1.960 (90%) menyetujui dokumen ini, dan 164 menolaknya. Dokumen ini diratifikasi oleh Paus Paulus pada 4 Desember 1963, ketika Konsili Vatikan II masih berlangsung. Dokumen ini segera diratifikasi Paus karena para bapa konsili melihat bahwa persoalan yang diangkat dalam dekrit ini merupakan persoalan yang sangat penting dan mendesak.

Seperi pada umumnya, judul-judul dokumen katolik diambil dari kata-kata awal dari dokumen tersebut, demikian juga dekrit ini diberi judul Inter Mirifica, karena dokumen ini diawali dengan kata "Inter Mirifica" dan. Dalam bahasa Indonesia berarti "Di antara yang Mengagumkan", tepatnya "Di antara penemuan-penemuan yang mengagumkan". Dari pengertian judul tersebut jelas sekali sikap Bunda Gereja tidak lagi memandang buruk penemuan-penemuan baru, namun justru sebaliknya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap kemajuan teknologi untuk pewartan iman gereja.

Konsili suci memandang dan menyadari bahwa setiap orang yang berhabungun erat dengan bidang alat-alat komunikasi ini harus sadar akan tanggungjawabnya sendiri untuk membatalkan orang dari penyalahgunaan alat-alat tersebut. Dengan berdasarakan visi ke depan, Konsili Suci berhasil memaparkan suatu pandangan yang luas dari semua masalah yang ditimbulkan oleh teknik-teknik komunikasi yang diperhadapkan kepada Gereja. Dokumen ini mengandung dua prinsip dasar dalam kaitan dengan penggunaan media komunikasi yakni: pertama, penggunaan media komunikasi harus mengacu pada aturan-aturan moral; dan kedua, setiap anggota Gereja harus menempatkan komunikasi pada pelayanan kerohanian.

8.2. *Communio et Progressus*

Enziklik Paus Paulus VI ini diterbitkan pada tanggal 23 Mei 1971, dengan tujuan memperbaharui dan melengkapi gagasan dan pandangan Konsili Vatikan II yang sudah diluncurkan dalam Inter Mirifica. Sejumlah gagasan yang termuat dalam Inter Mirifica diulas kembali dan diperbaharui, disesuaikan dengan tuntutan jaman. *Communio et Progressus* secara eksplisit menyebarkan dan memperluas prinsip-prinsip doktriner dan instruksi pastoral.

Enziklik *Communio et Progressus* secara khusus diarahkan kepada para uskup mengingat bahwa hal-hal yang dirumuskan di dalamnya merupakan tugas para uskup. Sedangkan bagi para profesional di bidang komunikasi sosial, ensiklik ini hanya mengemukakan harapan, hendaknya *Communio et Progressus* bisa diterima dan disambut baik oleh sekalian orang yang profesional terlibat aktif di bidang komunikasi sosial (CP, Art.5)

8.3. *Aetatis Novae*

Enziklik Paus Yohanes Paulus II ini di terbitkan pada tanggal 22 Februari 1992, dalam rangka peringatan 20 tahun *Communio et Progressus*. Sasaran ketika dipersiapkannya dokumen ini ialah komisi-komisi komunikasi sosial dan konferensi para uskup. Kendati demikian dokumen ini akhirnya diarahkan kepada Gereja dan para komunikator gereja.

Enziklik *Aetatis Novae* diterbitkan untuk menjawab tuntutan perkembangan jaman yang belum terjawab dalam *Communio et Progressus*. Alasan pokok diterbitkannya *Aetatis Novae* adalah munculnya aneka macam perubahan di dunia dewasa ini. Perubahan yang terjadi antara lain: perubahan politik, ekonomi, bahkan perubahan agama yang sebelumnya tidak terduga. Semuanya ini terjadi disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan pesat di bidang media komunikasi. Sejumlah perubahan ini ternyata mempunyai pengaruh terhadap kebijakan mengenai komunikasi, praktek komunikasi dan teknologi komunikasi di seluruh dunia (AN, art. 16-18).

8.4. *Ethics in Communications*

Dewan Kepausan menerbitkan *Ethics in Communication* pada tanggal 4 Juni 2000. Setelah gagasan Konsili Vatikan II mengenai komunikasi sosial berjalan kurang lebih 40 tahun dirasakan Inter Mirifica masih jauh dari realitas yang sedang terjadi. Tantangan kultur baru masa

kiri jauh di luar harapan para bapa Konsili. Hal ini menuntut usaha lebih dalam dan baru yang tidak hanya bertujuan menguasai jaman yang semakin modern ini tetapi juga untuk merumuskan suatu cara dan metode baru menjadi Gereja yang relevan dengan masyarakat yang terus di terpa oleh gelombang teknologi dan komunikasi modern.

Bunda Gereja menyadari bahwa media komunikasi berkembang sangat pesat. Hal ini memberikan kemudahan bagi umat manusia untuk semakin mengeksplorasi dunia. Namun di sisi lain perkembangan ini juga bisa membawa kehancuran umat manusia. Gereja melalui *Ethics in Communication* mengingatkan seluruh komponen Gereja mengenai bahaya tersebut. Dokumen yang secara khusus ditujukan kepada para jurnalis ini menegaskan bahwa media komunikasi sosial hanyalah sebuah instrumen yang digunakan oleh orang-orang yang menggunakannya. Penggunaannya ini diarahkan kepada perkombangan, penghargaan dan penghormatan pribadi manusia secara optimal (EC, art. 4).

8.5. Pesan Bapa Suci Pada Hari Komunikasi Sedunia ke-38

Hari Komunikasi Sosial Sedunia diperkenalkan pertama kali oleh Konsili Vatikan II untuk memberikan pesan tahunan Gereja kepada jemaatnya dan kepada seluruh dunia. Paus Yohanes Paulus II sangat sering menyatakan bahwa tanggungjawab dan tujuan positif dari komunikasi sosial tidak hanya ditanggung oleh seorang individu namun melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam festival religius ini dan melalui dukungan Dewan Kepausan untuk Komunikasi Sosial.

Pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-38, 24 Januari 2004, secara istimewa Paus Yohanes Paulus II mengamati pesannya untuk keluarga-keluarga kristiani: "Media setiap hari diambil sebagai ternu yang dikenal dalam banyak rumah tangga dan keluarga. Dalam Hari Komunikasi Sedunia ini, saya mendorong orang-orang media yang profesional maupun keluarga-keluarga untuk memahami privilese yang unik ini dan tanggungjawab yang terkandung di dalamnya".

Salah satu kata kunci dalam pesan di atas adalah "tanggungjawab". Paus menggunakan istilah ini karena tanggungjawab dirasa begitu pentingnya dalam suasana kebebasan sosial yang terus difasilitasi oleh kebebasan media yang menggoyahkan ini. Tanggungjawab dalaamkan pula kepada keluarga yang menggunakan media massa dan elektronik saat ini. Media menawarkan peluang-peluang yang bagus untuk perkembangan

motivasi dan pengetahuan, akan tetapi dituntut keterlibatan aktif dan tanggungjawab dari semua pihak. Tanggungjawab ini menyangkut kemauan untuk tidak membiarkan diri terseret ke dalam apa yang serba mudah dan nampaknya paling gampang, yang hanya berisi menyerahkan diri pada mekanisme pasar yang buta, mengakibatkan akibat-akibat sosial yang terjadi karena komunikasi yang kurang seimbang.

Penutup

Berhadapan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan sistem informasi yang sangat pesat saat ini, orangtua memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat berat atas balita keluarganya. Ketika keluarga kristiani dihadapkan pada kegemaran serba-serasi pesan-pesan informasi dan iklan yang saling bertentangan serta melawan nilai-nilai kemanusiaan dan iman maka keluarga kristiani atau orang tua perlu menjadi "orang pertama yang harus mengajarkan kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarganya tentang sekak belakang media". Orangtua dipanggil untuk memodifikasi anak-anak atau keturunannya dengan menggunakan media secara moderat, kritis, waspada dan bijaksana".

Ketika sebuah "keluarga basis" tidak mampu menghadapi tantangan itu sendirian maka para orangtua disarankan untuk bergabung dengan keluarga-keluarga lain untuk mempelajari dan membicarakan masalah-masalah tersebut secara berting-ulang dan mengorganisir diri untuk berani mengatakan kepada para produsen, pemasang iklan dan otoritas publik tentang apa yang mereka inginkan dari media.

Dengan mengacu pada ajaran rami gereja, secara kritis-nova ajaran tentang media komunikasi dan perkembangan teknologi yang sangat mengagumkan, semoga para pelaku media mampu menjadikan media sebagai sumber dukungan yang bermanfaat, menjadi stimulus dan inspirasi bagi keluarga-keluarga kristiani dalam usaha mereka menjadi bagian dari komunitas kehidupan dan cinta sejati. Semoga keluarga kristiani mampu memperjuangkan budaya solidaritas, kebebasan dan kedamaian. Namun semuanya ini tentunya menuntut usaha yang sungguh-sungguh dari masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferguson, Marjorie. 2002. "The Mythology About Globalization" dalam Denis McQuail (ed.) *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Gélinas, Jacques B. 2003. *Juggernaut Politics: Understanding Profound Globalization*. London: Zed Books.
- KWI: *Dokumen Kelembagaan II* (OBOR 1993) Littlejohn, Stephen W and Foss, Karen A. 2005. *Theories of Human Communication*. Canada: Thomson Wadsworth.
- Rawi Abdelal: *Theodore Levitt's 'The Globalization of Markets': An Evaluation after Two Decades*, dalam *Harvard NOM Working Paper No. 02-20: Harvard Business School Working Paper No. 03-082*.
- Sztropka, Piotr. *Sociologi Perubahan Sosial*. *Premada Tabloid Kontan on-line* edisi 9 Oktober 2000
- Valentinsen, Thomas A. 2005. *Media and Communication Theory Paper* (University of Southern Denmark): www.sdu.dk
- Watson, James. 1998. *Media Communication, An Introduction to Theory and Process*. London: Macmillan Press LTD.

GLOBALISASI EKONOMI DAN PEMISKINAN MASYARAKAT: BAGAIMANA INSTITUSI AGAMA MERESPONNYA?

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ faridmaruf2010.wordpress.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On